



Navigasi Strategis: Analisis SWOT Kebijakan Maritim Global di Provinsi Kepulauan Riau

Stevania Putri Damanik^{1*}, Rika Alfiantri², Missella Farriyadini³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: stevaniaputri28@gmail.com*

Abstract. *In the effort to foster global economic growth increasingly focused on maritime connectivity, global maritime axis policies have become increasingly crucial. This is especially true for island regions like the Riau Islands Province. In confronting these complex dynamics, SWOT analysis becomes a vital instrument for understanding the challenges and opportunities involved. This article explores strategic navigation within the context of the Riau Islands Province, with a focus on SWOT analysis of global maritime policies. Through this approach, the article aims to provide in-depth insights into the factors influencing maritime policies in the region, as well as highlighting strategic potentials and challenges that need to be addressed. Consequently, the results of this analysis are expected to serve as a foundation for effective decision-making in developing sustainable and adaptive maritime policies in the Riau Islands Province.*

Keywords : *Strategic Navigation, Maritime Policy, SWOT, Riau Islands*

Abstrak. Dalam upaya perkembangan pertumbuhan ekonomi global yang semakin terfokus pada konektivitas maritim, kebijakan poros maritim global menjadi semakin penting. Terutama bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, analisis SWOT menjadi instrumen yang vital untuk memahami tantangan dan peluang yang terkait. Artikel ini mengeksplorasi navigasi strategis dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus pada analisis SWOT terhadap kebijakan maritim global. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan maritim di wilayah tersebut, serta menyoroti potensi strategis dan tantangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif dalam mengembangkan kebijakan maritim yang berkelanjutan dan adaptif di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci : Navigasi Strategis, Kebijakan Maritim Global, SWOT, KEPRI

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan sebagaimana juga memiliki potensi maritim yang besar. Posisinya yang strategis, berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Indonesia, memberikan keuntunga dalam hal perdagangan, diplomasi, dan kerjasama maritim. Dengan demikian dapat dikatakan Provinsi Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan internasional, pariwisata laut, pengelolaan sumber daya alam kelautan, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat (BPS KEPRI).

Globalisasi memperkuat konektivitas maritim, kebijakan poros maritim global menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keamanan laut. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis yang penting dalam konteks ini, terletak di jalur perdagangan utama dan sebagai pintu gerbang bagi lalu lintas maritim di Asia Tenggara.

Provinsi Kepulauan Riau, dengan segala kekayaan alamnya dan potensi ekonominya yang besar, menjadi pusat perhatian dalam pengembangan kebijakan maritim global. Dinamika kompleks dalam hubungan antarnegara, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan perubahan iklim global semakin menekankan pentingnya kebijakan maritim yang kokoh dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, analisis SWOT menawarkan pendekatan yang holistik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun, dalam menghadapi dinamika kebijakan maritim global, terdapat sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memahami dampaknya terhadap Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi bagaimana kebijakan poros maritim global memengaruhi Provinsi Kepulauan Riau? Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau? dan bagaimana navigasi strategis dapat diterapkan dalam menghadapi dinamika kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau.

Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan poros maritim global berdampak pada wilayah kepulauan ini, serta bagaimana potensi strategisnya dapat dimanfaatkan sambil mengatasi tantangan yang ada. Maka dari itu, artikel ini mengusulkan pendekatan navigasi strategis untuk menghadapi kompleksitas dinamika kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan menganalisis dampak kebijakan poros maritim global terhadap Provinsi Kepulauan Riau, mengidentifikasi faktor-faktor SWOT yang memengaruhi kebijakan maritim di Provinsi Kepulauan Riau, dan menyajikan pendekatan navigasi strategis dalam menghadapi dinamika kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan hasil analisis ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang efektif dalam merumuskan kebijakan maritim yang berkelanjutan dan adaptif di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah ini dapat memainkan peran yang signifikan dalam konstelasi global.

Hingga saat ini, implementasi kebijakan Poros Maritim Global masih kekurangan blueprint rinci di tingkat nasional dan lebih cenderung pada diskusi makro terkait kerjasama internasional, tanpa kemajuan yang berarti. Mega proyek seperti pembangunan pelabuhan internasional, tol laut, dan infrastruktur lainnya masih terhambat dalam realisasinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menyeluruh dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait program-program di daerah yang menjadi fokus kebijakan. Langkah ini akan membantu merumuskan program yang lebih efektif dan terukur di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Salah satu ahli menjelaskan metode analisis kualitatif dalam bukunya yang berjudul "*Case Study Research: Design and Methods*". Robert K. Yin menjelaskan secara mendalam mengenai pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini sering digunakan untuk mendalami fenomena yang kompleks, seperti kebijakan publik, dengan memeriksa kasus-kasus tertentu secara rinci. Artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) kebijakan Poros Maritim Global di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan maritim di wilayah tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasinya.

Artikel ini akan mengintegrasikan konsep geopolitik dan analisis SWOT sebagai analisis utama dalam menganalisis kebijakan maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian Pustaka yang berisi tinjauan mendalam terhadap literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.. Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, data online, dan berita yang relevan dengan topik penelitian. Analisis akan dilakukan dengan mengumpulkan dan mendiskusikan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini Menuju visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo menegaskan lima pilar strategis. Pertama, adalah pemulihan budaya maritim Indonesia. Kedua, fokus pada pengelolaan sumber daya laut dengan penekanan pada kedaulatan pangan melalui pembangunan industri perikanan yang berpihak pada nelayan. Ketiga, komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui proyek tol laut, pelabuhan, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, diplomasi maritim yang mendorong kerja sama kelautan dengan mitra internasional. Kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia (KOMINFO, 2016).

Presiden Jokowi melengkapi visi tersebut dengan enam prinsip kebijakan, termasuk wawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, pengelolaan terintegrasi dan transparan, partisipasi, serta pemerataan dan kesejahteraan. Selain itu, dia juga merinci tujuh puluh enam kebijakan utama. Fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur tol laut, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, serta penerapan diplomasi maritim. Hal ini

mencakup peningkatan kerja sama dan penyelesaian konflik maritim, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan tindak perompakan di laut.

Dalam artikel ini, teori geopolitik menjadi yang paling relevan. Geopolitik adalah studi tentang hubungan internasional yang mempertimbangkan faktor-faktor geografis, politik, ekonomi, dan militer dalam menentukan kebijakan suatu negara. Seorang ahli bernama Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkenal dengan teorinya tentang keunggulan laut, dalam bukunya Mahan, A. T. (1890) *“The Influence of Sea Power upon History”* halaman 1660-1783, dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor geografis dan strategis, seperti posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menghadap langsung ke jalur perdagangan utama, memengaruhi kebijakan maritim global. Dalam analisis kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau, konsep geopolitik akan membantu untuk memahami pentingnya posisi geografis wilayah tersebut, serta dampaknya terhadap kebijakan maritim global. Selain itu, teori analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan maritim di Kepulauan Riau, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif dalam mengembangkan strategi kebijakan yang tepat.

Dengan letak geografisnya yang strategis di antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, serta potensi alam yang sangat melimpah, Provinsi Kepulauan Riau berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi Republik Indonesia. Selain menjadi poros maritim Indonesia, provinsi ini juga memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Hal ini disebabkan oleh posisi geografisnya yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Transformasi Provinsi Kepulauan Riau menjadi poros maritim Indonesia dan dunia memerlukan dukungan kuat dari kebijakan dan keputusan yang tegas. Penting untuk merumuskan kebijakan jangka pendek yang didukung oleh kemauan politik yang kuat, dengan fokus pada masa depan Indonesia yang lebih baik melalui pemanfaatan potensi maritimnya secara optimal.

Implementasi kebijakan Poros Maritim Global di Provinsi Kepulauan Riau masih terkendala oleh sejumlah faktor, seperti belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya yang belum maksimal disertai keterbatasan sarana budidaya, minimnya industri pengolahan ikan, absennya zonasi wilayah pesisir dan laut yang memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan, serta masih berlangsungnya praktik IUU Fishing. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, struktur

armada kapal yang masih tradisional, kurangnya infrastruktur pendukung di pusat pembangunan perikanan terpadu, dan kekurangan dalam kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menjadi hambatan utama. (KOMINFO KEPRI, 2018)

Analisis SWOT terhadap Provinsi Kepulauan Riau dalam konteks kebijakan Poros Maritim Global menyoroti berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Ketika melihat kekuatan (Strengths), Kepulauan Riau menonjol dengan posisi geografisnya yang sangat strategis, terletak di persimpangan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Dengan posisi ini, daerah ini menjadi hub penting dalam jalur perdagangan maritim global. Selain itu, sumber daya alam laut yang melimpah di sekitarnya, seperti ikan, gas, dan minyak bumi, menambah nilai strategisnya sebagai pusat ekonomi maritim. Tak lupa, infrastruktur maritim yang sudah ada, terutama pelabuhan internasional yang ada di Batam dan Tanjungpinang, memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut.

Di sisi lain, terdapat kelemahan (Weaknesses) yang perlu diatasi. Kepulauan Riau, dalam konteks kebijakan Poros Maritim Global, menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya praktik ilegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan dan mengganggu aktivitas nelayan lokal. Ancaman lainnya adalah potensi risiko pertumpahan minyak di sekitar perairan Kepulauan Riau yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tidak hanya itu, keberadaan perdagangan orang juga menjadi masalah serius yang mengancam keamanan manusia dan hak asasi manusia di wilayah ini. Selain itu, pelanggaran hukum maritim seperti penyelundupan narkoba dan senjata ilegal, serta aktivitas kejahatan seperti perompakan di laut, juga menjadi ancaman yang perlu ditangani secara serius. Oleh karena itu, penanganan masalah-masalah ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Kepulauan Riau sebagai poros maritim Indonesia dan dunia.

Namun, potensi besar masih terbuka lebar dalam peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan. Dukungan dari kebijakan Poros Maritim Global memberikan kesempatan untuk memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros maritim Indonesia dan dunia. Aspek peluang lain dari kebijakan maritim adalah peningkatan keamanan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai respons terhadap kasus di Laut Cina Selatan dan peristiwa lainnya. Hal ini termasuk meningkatnya aktivitas kapal asing di perairan Natuna. Peningkatan keamanan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi sumber daya alam Indonesia di jalur perairan yang strategis, tetapi juga untuk mempertahankan kedaulatan wilayah.

Tetapi, berbagai ancaman (Threats) juga mengintai. Persaingan regional dengan negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, dapat menjadi hambatan dalam investasi dan

pengembangan infrastruktur maritim. Dampak dari perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya kelautan. Tidak hanya itu, potensi konflik sumber daya kelautan antara berbagai pihak, termasuk antara nelayan lokal dan industri besar, juga merupakan ancaman serius yang perlu diatasi.

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika ini, strategi pengembangan Kepulauan Riau sebagai poros maritim Indonesia dan dunia harus mempertimbangkan upaya untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sambil mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Ini akan memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kepulauan Riau.

Navigasi strategis dalam menghadapi dinamika kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pemantauan dan analisis kebijakan maritim global untuk memahami perubahan dalam kerangka regulasi dan kerjasama internasional. Kedua, identifikasi peluang ekonomi, keamanan, dan lingkungan yang muncul dari kebijakan maritim global. Ketiga, pengembangan strategi responsif yang meliputi pengaturan prioritas, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah implementasi. Keempat, penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga dan mitra internasional dalam berbagai bidang seperti pengawasan perikanan, keamanan maritim, dan infrastruktur. Kelima, advokasi kepentingan maritim Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional dan internasional untuk memperoleh dukungan politik dan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, navigasi strategis menjadi kunci dalam memastikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam dinamika kebijakan maritim global dengan efektif. Navigasi strategis dapat membantu Provinsi Kepulauan Riau dalam memantau, mengidentifikasi, dan merespons dinamika kebijakan maritim global. Ini meliputi pengembangan strategi responsif, penguatan kerjasama regional, pengembangan kebijakan yang mendukung kepentingan maritim, serta advokasi atas kepentingan Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, navigasi strategis menjadi penting dalam menjaga keamanan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan dalam konteks kebijakan maritim global di Provinsi Kepulauan Riau.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menganalisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threat) implementasi kebijakan Poros Maritim Global di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk memulihkan potensi maritim Provinsi Kepulauan Riau dan menjaga kedaulatan Indonesia atas perbatasan teritorialnya telah memberikan hasil yang memuaskan, namun perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut.

Dukungan dari kebijakan Poros Maritim Global membuka peluang untuk memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai poros maritim Indonesia dan dunia. Pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, dan industri maritim menjadi peluang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan juga membuka peluang untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, peluang ini juga diiringi dengan beberapa tantangan. Ancaman seperti illegal fishing, perdagangan orang, dan risiko pertumpahan minyak perlu ditangani secara serius. Persaingan global dan ketidakpastian geopolitik juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Meskipun demikian, dengan mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang yang ada, Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi pemain utama dalam peta maritim global. Dengan memanfaatkan potensi maritimnya secara maksimal, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan memperkuat kedaulatan negara di lautannya.

5. DAFTAR REFERENSI

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan poros maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan laut. *Indonesia Perspective*, 3, 1–10.
- Artha Yudilla, P. A. (2020). Analisa SWOT kebijakan poros maritim global di wilayah Kepulauan Riau. *Journal of International Studies*, 3(2), 123–134.
- IDSS. (n.d.). *Indonesia's global maritime fulcrum: Challenges and trajectories*. Singapore: RSIS.
- Indonesia, K. K. (n.d.). *Kebijakan kelautan Indonesia* (p. 70).
- Kepri, BPS. (n.d.). *Geografi Kepulauan Riau*.
- Kepri, K. (2018). Permasalahan dan isu strategis Kepulauan Riau. *Jurnal Kepri*, 5(1), 45–60.
- Kepri, P. (n.d.). *Pemprov Kepri optimalkan potensi maritim dan investasi*. Media Kepri.
- Kominfo. (2016). *Menuju poros maritim dunia*.

- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Little, Brown and Company.
- Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan poros maritim dunia Joko Widodo dan implikasi internasionalnya. In *Proceedings of the International Conference on Maritime Policy* (pp. 167–190).
- Poti, J. (n.d.). Membangun national branding image Kepulauan Riau sebagai poros maritim dunia. *Jurnal Branding*, 2(1), 22–30.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.